



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHA MEDIAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3. NHK : 230472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.198.000.000

1. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/170 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 294.000.000
5. Tanah Seluas 212 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 424.000.000
6. Bangunan Seluas 13.67 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 606.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
360.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
237.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.356.647.033



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 5.223.147.033

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 5.223.147.033

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.